

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana ialah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan pidana menurut beberapa teori antara lain : suatu pembalasan, memberi rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan, memperbaiki orang, dan mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama.¹

Jenis-jenis pidana terdapat di dalam Pasal 10 KUHP, antara lain :

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan (UU No.20/1946)
2. Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.²

¹ Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 12.

²Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm. 162.

Pidana yang paling berat diantara jenis-jenis pidana tersebut adalah pidana mati, karena pidana mati merupakan suatu pidana langsung terhadap nyawa seseorang. Penerapan pidana mati harus hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang sangat matang, hakim yang menjatuhkannya-pun tidak boleh ada keraguan dalam benaknya dalam memutus perkara. Hakim harus mempunyai keyakinan dan harus percaya diri serta terbebas dari pengaruh luar yang dapat merusak keyakinannya.

Persoalan yang muncul dewasa ini dan sangat meresahkan serta menggugah hati nurani, terutama bagi mereka yang tidak setuju terhadap “*raison de’etre*” dari pidana mati, ialah tenggang waktu yang sering kali begitu lama dan seperti tidak jelas apakah akan dilaksanakan pidana mati atau tidak. Penundaan pidana mati dalam jangka waktu bertahun-tahun, apalagi sampai melebihi sepuluh atau dua puluh tahun, jelas merupakan pertanggungjawaban dari pihak yang berkuasa. Pertanggungjawaban itu, apa pun alasan atau motivasinya, tidak dapat dibenarkan secara moral dan etis. Penundaan eksekusi pidana mati yang tidak jelas kapan waktunya serta apakah ada kemungkinan dikabulkannya grasi, juga untuk kedua kali, dan terlepas juga dari jenis dan sifat serta bentuk perbuatan jahatnya itu, maka motivasi yang tidak jelas dengan mengulur-ulur waktu eksekusi bukan suatu kebijakan yang terpuji. Selain merupakan “perkosaan” hak asasi manusia, juga ada indikasi bahwa sifat penundaan eksekusi pidana mati tanpa motivasi yang jelas adalah suatu kekejaman tersediri.

Kekejaman yang dimaksudkan di sini bertalian dengan tidak jelas kapan akan dieksekusi pidana mati, mempunyai implikasi dan konsekuensi bahwa terhadap

pidana mati adanya semacam pembiaran proses penderitaan yang tidak etis dan amoral. Jika terpidana mati dibiarkan tanpa ada kepastian dalam tenggang waktu yang lama bertalian dengan dilaksanakannya atau tidak dieksekusinya pidana mati, sesungguhnya telah direkayasa semacam penganiayaan rohani dan penyiksaan psikis serta penggebutan mental.

Bukan hanya aspek rohani, psikis, dan mental yang dibuatkan menderita secara tidak berdaya dan sepatutnya tidak boleh diderita oleh yang bersangkutan, penundaan eksekusi pidana mati-pun tanpa batas waktu yang jelas jika dikaji dari segi penologi berupa suatu viktimisasi secara terselubung, dan implikasi dari viktimisasi secara terselubung ini membawa konsekuensi lain, yaitu pidana mati seperti kehilangan sifat menakutkan (*deterrence*). Dikatakan demikian sebab pidana mati yang tidak dijalankan dengan segera, jelas akan memberikan kesan yang keliru atau “racun” bagi para calon penjahat atau calon pelaku yang kemungkinan akan mendapat ganjaran pidana yang sama.³

Penerapan kebijakan moratorium terhadap eksekusi pidana mati di Indonesia pernah diterapkan oleh Jaksa Agung RI, HM. Prasetyo, dalam kasus yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2016 terhadap 10 (sepuluh) orang terpidana mati antara lain : Ozias Sibanda (warga negara Nigeria); Obinna Nwajagu (warga negara Nigeria); Eugene Ape (warga negara Nigeria); Fredderik Luttar (warga negara Nigeria); Agus Hadi (warga negara Indonesia); Pujo Lestari (warga negara Indonesia); Zulfiqar Ali (warga negara Pakistan); Gurdip Singh (warga negara

³Sahetapy J.E., 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.68.

India); Merri Utami (warga negara Indonesia); dan Okonkwo Nongso Kingsley (warga negara Sierra Leone Afrika Barat).⁴

Sampai saat penulisan hukum ini, belum ada kepastian mengenai eksekusi pidana mati bagi 10 (sepuluh) orang terpidana tersebut. Alasan-alasan penundaan eksekusi pidana mati dalam kasus tersebut juga masih belum jelas. Jaksa Agung Republik Indonesia, HM. Prasetyo hanya mengatakan bahwa penundaan eksekusi pidana mati tersebut dikarenakan oleh adanya aspek yuridis dan nonyuridis terkait 10 (sepuluh) terpidana mati yang harus dilihat kembali. Pihak Kejaksaan Agung hanya ingin semua aspek tidak ada yang dilanggar karena terburu-buru dalam mengambil tindakan.

Alasan penundaan eksekusi tersebut seharusnya disampaikan kepada publik secara jelas dan terperinci sehingga tidak menimbulkan keresahan-keresahan di dalam masyarakat dan tentunya akan terlanggar prinsip kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan eksekusi pidana mati dikarenakan diterapkannya kebijakan moratorium terhadap eksekusi pidana mati tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan dalam latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dengan judul “Implikasi Kebijakan Moratorium Eksekusi Pidana Mati Terhadap Kepastian Hukum”.

⁴<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsu=0&id=11075>, diakses : Rabu 07 September 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana implikasi kebijakan moratorium eksekusi pidana mati terhadap kepastian hukum?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan moratorium eksekusi pidana mati terhadap kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana dalam kaitannya dengan pidana mati.

2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum dan juga pemerintah khususnya dalam hal penerapan eksekusi pidana mati.
- b. Bagi hakim, hasil penelitian ini mendukung terciptanya suatu peradilan yang bebas dari pengaruh luar sehingga terciptanya suatu peradilan yang independen, khususnya mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan pidana mati.

- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam menjalankan dan menaati segala peraturan hukum yang berfungsi untuk mengurangi perbuatan-perbuatan tindak pidana khususnya perbuatan-perbuatan hukum yang dapat diancam dengan pidana mati.
- d. Bagi penulis, penulisan hukum/skripsi ini membantu penulis untuk dapat belajar dan lebih memahami mengenai ilmu hukum khususnya mengenai sanksi pidana mati.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti dengan judul Implikasi Kebijakan Moratorium Eksekusi Pidana Mati Terhadap Kepastian Hukum, merupakan karya asli penulis. Dalam penelitian ini penulis khusus meneliti tentang implikasi kebijakan moratorium eksekusi pidana mati terhadap kepastian hukum. Penelitian ini berbeda dengan judul penelitian yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa lainnya terdahulu, antara lain :

1. Tiara Erdi Yasmita, nomor mahasiswa 1212011342, Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2016, dengan judul penelitian Analisis Penundaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika.
 - a. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengapa terjadi faktor penghambat dalam penundaan eksekusi pidana mati pada pelaku tindak pidana narkotika ?.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi faktor penghambat dalam eksekusi pidana mati pada pelaku tindak pidana narkotika.
- c. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah bahwa faktor penghambat dalam penundaan eksekusi pidana mati, yaitu: Faktor Substansi Hukum (Perundang-undangan) karena tidak adanya pengaturan mengenai batasan waktu dalam mengajukan grasi dan peninjauan kembali, Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum) karena dalam pelaksanaannya para penegak hukum memerlukan koordinasi, Faktor Sarana dan Fasilitas terkait anggaran dana, dan Faktor Masyarakat karena adanya elit politik dari sebagian masyarakat Indonesia yang disebabkan adanya kepentingan-kepentingan politik maupun penguasa pimpinan negara yang menekan untuk tidak dilaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati. Berdasarkan analisis dari keempat faktor tersebut, faktor substansi hukum atau perundang-undangan yang tidak mengatur adanya batasan waktu dalam mengajukan Peninjauan Kembali dan Grasi dan faktor masyarakat karena adanya tekanan dari masyarakat itulah yang menjadi faktor terbesar dalam penundaan eksekusi pidana mati pada pelaku tindak pidana narkotika.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi yang ditulis penulis berbeda dengan skripsi karya Tiara Erdi Yasmita tersebut baik melalui identitas, judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian dari skripsi yang sama-sama membahas tentang penundaan pidana

mati, tetapi skripsi karya Tiara Erdi Yasmita tersebut menfokuskan kepada pelaku tindak pidana narkoba saja.

2. Eka Supandi Lingga, nomor mahasiswa 060200178, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2012, dengan judul penelitian Tinjauan Ham Terhadap Penundaan Eksekusi Pidana mati.

- a. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perkembangan hukuman eksekusi hukuman pidana mati di Indonesia, serta Faktor-faktor apa saja yang ada dalam penundaan eksekusi hukuman pidana mati di Indonesia dari sudut pandang HAM ?.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan eksekusi pidana mati di Indonesia, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam penundaan eksekusi pidana mati di Indonesia dari sudut pandang HAM.
- c. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Perkembangan pidana mati di Indonesia sudah dikenal dalam hukum adat dan bukanlah berdasarkan hukum yang dibawa oleh bangsa penjajah. Pidana sudah merupakan ketentuan hukum positif dan dipertahankan pidana mati di Indonesia adalah alat untuk menakuti atau mencegah terjadi kejahatan dan sebagai saluran kepada masyarakat yang ingin”membalas dendam” melalui saluran perundang-undangan. Sebab jika tidak diatur dalam perundang-undangan, masyarakat akan berniat main hakim sendiri (*eigen richting*). Faktor-faktor dalam penundaan eksekusi pidana mati di Indonesia dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu terdapat dalam upaya hukum biasa

(pemeriksaan tingkat banding dan upaya hukum kasasi), upaya hukum luar biasa (pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), dan permohonan grasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi yang ditulis penulis berbeda dengan skripsi karya Eka Supandi Lingga tersebut baik melalui identitas, judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian dari kripsi yang sama-sama membahas tentang penundaan pidana mati, tetapi skripsi karya Eka Supandi Lingga tersebut memfokuskan kepada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Xena Dora Thea Bening, nomor mahasiswa 120511006, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016, dengan judul Kajian Terhadap Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika Di Indonesia (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso).
 - a. Permasalahan yang diangkat adalah apakah yang menjadi dasar penundaan eksekusi mati terpidana narkotika Mary Jane Fiesta Veloso dan bagaimana dampak penundaan eksekusi mati terpidana narkotika Mary Jane Fiesta Veloso ?.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor yang menjadi dasar dari penundaan eksekusi mati terpidana narkotika, Mary Jane Fiesta Veloso dan dampak penundaan eksekusi mati terpidana narkotika Mary Jane Fiesta Veloso.

c. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain :

- 1) Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso disebabkan oleh dua (2) hal, yaitu alasan yang bersifat yuridis dan alasan yang bersifat politis. Alasan yang bersifat yuridis dari penundaan tersebut adalah kebijakan presiden yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), sedangkan alasan yang bersifat politis adalah karena jadwal eksekusi tersebut bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika maka Indonesia menjaga hubungan baik dengan Filipina dan juga negara-negara lain peserta Konferensi Asia Afrika(KAA).
- 2) Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso mempunyai dampak, yaitu sebagai berikut:
 - a) Dampak sosial, yaitu muncul banyak tanggapan dari masyarakat baik yang bersifat mendukung maupun yang mengkritik sikap pemerintah mengenai penundaan tersebut.
 - b) Dampak pada bidang hukum, yaitu dibutuhkan suatu peraturan untuk mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi mati.
 - c) Dampak terhadap Mary Jane Fiesta Veloso secara pribadi, yaitu penundaan tersebut merupakan bentuk penguatan iman.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi yang ditulis penulis berbeda dengan skripsi karya Xena Dora Thea Bening tersebut baik melalui identitas, judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian dari kripsi yang sama-sama membahas tentang penundaan pidana mati, tetapi skripsi karya Xena Dora Thea Bening tersebut memfokuskan kepada terpidana narkoba dalam studi kasus Mary Jane Fiesta Veloso.

F. Batasan Konsep

1. Implikasi

Implikasi menurut para ahli adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.⁵

2. Kebijakan Moratorium

Kebijakan moratorium menurut kamus Merriam-Webster adalah suatu tindakan otoritas yang berwenang untuk memberlakukan periode waktu tunggu terhadap suatu hal tertentu.⁶

3. Eksekusi Pidana mati

Eksekusi pidana mati adalah pelaksanaan putusan hakim terhadap pidana mati sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁷

4. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.⁸

⁵<http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi>, diakses pada Jumat, 09 September 2016.

⁶<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-moratorium/>, diakses 16 September 2016.

⁷<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-eksekusi-pidana-mati/>, diakses 16 September 2016.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer;
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, media massa, hasil penelitian dan internet yang berkaitan dengan hasil penelitian.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1028.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan non hukum dari buku, media massa, hasil penelitian, dan internet.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan melakukan tanya jawab terhadap Bapak Yendi Kusyendi, SH sebagai Kepala Sub Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan terbuka.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang hendak diteliti.

5. Proses Berpikir Atau Prosedur Bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai beberapa hal dalam sub-sub bab, diantaranya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang kosep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian. Variabel pertama yaitu tinjauan kebijakan moratorium eksekusi pidana mati, yang berisi tentang pengertian dari kebijakan moratorium, tinjauan umum tentang eksekusi pidana mati dan tinjauan tentang kepastian hukum. Variabel kedua yaitu implikasi kebijakan moratorium eksekusi pidana mati terhadap kepastian hukum, yang berisi tentang landasan hukum kebijakan moratorium eksekusi pidana mati, implikasi moratorium eksekusi pidana mati, korelasi kebijakan moratorium eksekusi pidana mati terhadap kepastian hukum. Selanjutnya berisi mengenai kasus tentang penangguhan/penundaan/penerapan kebijakan moratorium terhadap 10 (sepuluh) orang terpidana mati dalam eksekusi

pidana mati jilid III yang dilakukan pada dini hari tanggal 28 Juli 2016, yang membahas tentang analisis kasus penundaan eksekusi pidana mati tersebut.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik si penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan oleh penulis maupun instansi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dari skripsi ini.

